

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara maritim yang terdiri dari 17.000 pulau lebih, yang merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Beranjak dari kondisi geografis Indonesia tersebut, maka peranan transportasi laut dan penyebrangan sangat dominan dalam memperlancar arus barang dan manusia. Mengingat pentingnya transportasi laut dan penyebrangan, maka penyediaan sarana prasarana transportasi laut dan penyebrangan harus dapat mengatasi kebutuhan pemerintah akan jasa transportasi laut dan penyebrangan harus dapat mengatasi kebutuhan permintaan akan jasa transportasi laut dan penyebrangan secara efektif dan efisien.

Transportasi di era globalisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang segala aktivitas maupun rutinitasnya sehari-hari. Transportasi publik umumnya meliputi kereta dan bus, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, pelabuhan penyebrangan, taxi, dan lain-lain. Dengan makin tingginya arus barang dan manusia melalui laut dan penyebrangan sebagai akibat dari laju pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasil pembangunan keseluruhan plosok tanah air, maka kebutuhan lintasan penyebrangan antar pulau dan antar pelabuhan semakin meningkat pula.

Keberadaan transportasi public yang baik sangat mempengaruhi roda perekonomian suatu wilayah atau daerah. Keberhasilan pertumbuhan perekonomian di suatu Negara tidak akan lepas dari campur tangan pemerintah dalam upaya menciptakan transportasi publik yang nyaman, aman, bersih, dan tertata dengan baik. Sebagai Negara kepulauan contohnya harus mempunyai sarana prasarana yang menunjang. Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, maka alat transportasi. Setiap moda transportasi memiliki peran dan kapasitasnya dalam melayani penumpang. Transportasi publik yang sangat menunjang tugas pemerintah adalah usaha pemerataan pembangunan sejatinya adalah moda transportasi laut.

Transportasi laut sangat berperan penting untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga pendistribusi barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dan tidak hanya berpusat di satu wilayah atau satu pulau saja.

Untuk menciptakan suatu industri transportasi laut nasional yang kuat, yang dapat berperan sebagai penggerak pembangunan nasional, menjangkau seluruh wilayah perairan nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kebijakan pemerintah di bidang transportasi laut tidak hanya terbatas pada kegiatan angkutan laut saja, namaun juga meliputi aspek kepelabuhan, serta keselamatan pelayaran.

Dalam hal ini permasalahan dalam penanganan dalam dokumen pada UPTD pelabuhan penyebrangan Kab. Kendal mengakibatkan penanganan dimbarkasi embarkasi terganggu dan tidak terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan berkembangnya dunia pelayaran ditandai dengan semakin tingginya persaingan multilateral. Hal ini memacu adanya suatu peningkatan mutu pelayaran ataupun pemberian sarana seoptimal mungkin kepada pengguna jasa dalam bidang pelayaran mebuca cabang-cabang baru disetiap pelabuhan dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menangani kapal non milik.

Maka penulis mengambil karya tulis yang berjudul “Penanganan Dimbarkasi Embarkasi pada kapal KM, Kalibodri Oleh UPTD pelabuhan penyebrangan Kab. Kendal”.

1.2 Rumasan Masalah

1. Instasi-instasi yang terkait dalam penanganan kapal di UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab. Kendal ?
2. Dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam penanganan kapal di UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab. Kendal ?
3. Bagaimana penanganan dibarkasi embarkasi kapal pada UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab. Kendal ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis

1. Tujuan Penulis

- a. Untuk mengetahui apa saja instansi-instansi yang terkait dalam penanganan kapal di UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab.Kendal.
- b. Untuk mengetahui Dokumen-dokumen apa yang diperlakukan dalam penanganan kapal di UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab.Kendal.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana penanganan dembarkasi embarkasi kapal pada UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab.Kendal.

2. Kegunaan Penulis

- a. Manfaat bagi pelabuhan

Dapat dijadikan bahan masukan untuk permasalahan dalam penanganan dokumen yang timbul setiap kali dalam penanganan dalam dokumen pelayanan.

- b. Manfaat bagi Dunia akademis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan khususnya mengenai proses penanganan dokumen

- c. Manfaat bagi Masyarakat

Untuk memberikan suatu pemikiran kepada pembaca akan pentingnya penanganan pada dokumen sebagai upaya dalam dunia pelayaran dalam menangani kapal dan di perlukan tanggung jawab yang benar dan baik

- d. Manfaat bagi penulis

Dapat memahami prosedur permasalahan dalam menangani dokumen

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Penulis memaparkan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan Pengertian Prosedur, Pengertian Kapal, Pengertian Pelabuhan, Macam-macam Pelabuhan, Fungsi Pelabuhan, Pelayanan Kapal, Sejarah Kantor UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kab. Kendal, Visi dan Misi Kantor UPTD, Struktur Organisasi Kantor UPTD.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang Jenis-jenis Dokumen pada saat Kedatangan dan Keberangkatan Kapal, Prosedur Pelayanan pada saat kedatangan Kapal di Pelabuhan Kendal, Prosedur pada saat Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Kendal, Instansi-instansi yang terkait dalam kedatangan dan keberangkatan Kapal di Pelabuhan Kendal.

BAB 5 PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan Saran